

**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH,  
PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN  
DI PROVINSI ACEH**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:**

**AIDA SHAFIRA  
NIM. 4022017102**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022**

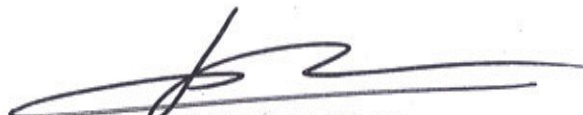
## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh” an Aida Shafira, NIM 40222017102 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 5 Agustus 2022, Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

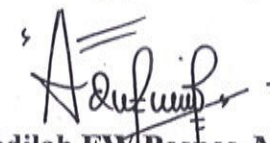
Langsa, 5 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa


Penguji I

  
Muhammad Dayyan, M.Ec  
NIDN: 2008087704

Penguji II

  
Ade Fadilah FW Pospos, M.A  
NIP: 198804072019032010


Penguji III

  
Dr. Abdul Hamid, MA  
NIP. 197307312008011007

Penguji IV

  
Shelly Midesia, S.E. M.Si, Ak  
NIP. 199011122019032007

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa

  
Prof. Dr. Iskandar, M.CL  
NIP 19650616 199503 1 002

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul:**

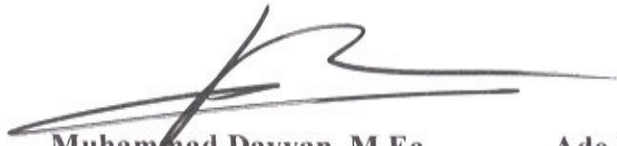
**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH,  
PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN  
DI PROVINSI ACEH**

**AIDA SHAFIRA**  
Nim. 4022017102

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

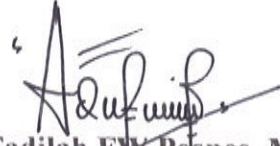
Langsa, 5 Agustus 2022

**Pembimbing I**



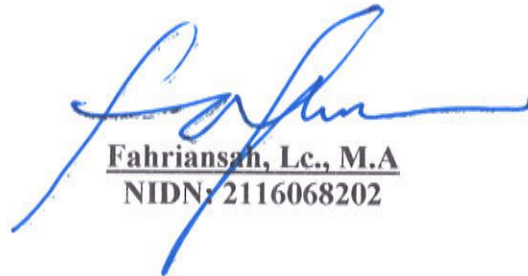
Muhammad Dayyan, M.Ec  
NIDN: 2008087704

**Pembimbing II**



Ade Fadilah FW Pospos, M.A  
NIP: 198804072019032010

**Mengetahui:**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**



Fahriansah, Lc., M.A  
NIDN: 2116068202

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Shafira  
NIM : 4022017102  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh,  
Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di  
Provinsi Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Februari 2022

Hormat saya,



*Aida Shafira*  
Aida Shafira

## *Motto*

*"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama  
kesabaran, kelapangan bersama  
kesempitan, dan kesulitan bersama  
kemudahan". (HR Tirmidzi)*

## ABSTRAK

Kemiskinan menjadi masalah bagi negara dan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh. Hal tersebut juga diketahui dari pemberitaan bahwa Aceh merupakan daerah miskin di pulau Sumatera. Pemerintah berusaha mengurangi persentase kemiskinan dengan mengupayakan pembangunan melalui program-program pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Selain itu tingkat pengangguran masyarakat turut berdampak pada kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Demikian halnya dengan inflasi bila terjadi peningkatan, maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta dapat menjadi penyebab kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh APBD, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan data sekunder berupa APBD, pengangguran dan inflasi serta kemiskinan tahun 2006-2020 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Aceh. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji t dan uji F serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sebesar 88,8% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengangguran dan inflasi dapat menjelaskan variabel kemiskinan di Provinsi Aceh.

**Kata Kunci:** APBD, Pengangguran, Inflasi dan Kemiskinan

## **ABSTRACT**

*Poverty is a problem for the country and for regions in Indonesia, including the province of Aceh. It is also known from the news that Aceh is a poor area on the island of Sumatra. The government is trying to reduce the percentage of poverty by pursuing development through government programs using the Aceh Revenue and Expenditure Budget. In addition, the unemployment rate of the community also has an impact on poverty because they have no income. Likewise with inflation, if there is an increase, it will have an impact on decreasing people's purchasing power and can be a cause of poverty. This research was conducted with the aim of knowing the effect of APBD, unemployment and inflation on poverty in Aceh Province. The data used are secondary data in the form of APBD, unemployment and inflation and poverty for 2006-2020 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance and the Central Statistics Agency for Aceh. Data analysis used multiple linear regression, t test and F test and the coefficient of determination (R<sup>2</sup>) test. The results showed that the Regional Revenue and Expenditure Budget had a negative and significant effect on poverty. Unemployment and inflation have a positive and insignificant effect on poverty. As much as 88.8% of the Regional Revenue and Expenditure Budget, unemployment and inflation can explain the poverty variable in Aceh Province.*

**Keywords:** *APBD, Unemployment, Inflation and Poverty*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul **“Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”**, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT, dan bantauan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasi sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Fahriansyah, Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan dan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.



4. Muhammad Dayyan, M.Ec, selaku Pembimbing I dan Ade Fadilah FW Pospos, M.A, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan starf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua saya ayah dan ibu. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman, terima kasih atas semangat, do'a dan untuk kebersamaan kita yang luar biasa, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
8. Semua keluarga, yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***  
Penulis

Aida Shafira

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.5.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.6 Penjelasan Istilah .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh .....	13
2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh .....	13
2.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh .....	14
2.1.3 Penggolongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.....	15
2.2 Pengangguran .....	16
2.2.1 Pengertian Pengangguran .....	16
2.2.2 Jenis-jenis Pengangguran .....	17
2.2.3 Dampak Buruk Pengangguran.....	20
2.3 Inflasi .....	22
2.3.1 Pengertian Inflasi .....	22
2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Inflasi.....	24
2.3.3 Jenis-jensi Inflasi .....	26
2.4 Kemiskinan .....	27
2.4.1 Pengertian Kemiskinan .....	27
2.4.2 Penyebab Kemiskinan .....	30
2.4.3 Indikator Kemiskinan .....	31
2.5 Penelitian Sebelumnya .....	32
2.6 Kerangka Konseptual .....	34
2.7 Hipotesis .....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	35
3.2.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2.2 Sumber Data .....	36
3.3 Populasi dan Sampel.....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5 Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel.....	39
3.6 Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Objek Penelitian .....	45
4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh .....	45
4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif .....	51
4.1.3. Hasil uji Asumsi Klasik .....	56
4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik .....	56
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas .....	57
4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	57
4.1.3.4 Uji Autokorelasi .....	58
4.1.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	59
4.1.5 Hasil Uji t.....	61
4.1.6 Hasil Uji F (Uji Secara Simultan) .....	62
4.1.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	63
4.2 Analisis.....	64
4.2.1. Pengaruh APBA terhadap Kemiskinan .....	64
4.2.2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan.....	65
4.2.3. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan .....	66
4.2.4. Pengaruh APBA, Pengangguran, Inflasi terhadap Kemiskinan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2. Saran-saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya.....	32
Tabel 3.1	Operasional Variabel .....	39
Tabel 3.2	Pengambilan Keputusan ada Tidaknya Autokorelasi .....	42
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.2	APBA, Penganguran, Inflasi dan Kemiskinan Provinsi Aceh.....	53
Tabel 4.3	Uji Normalitas .....	56
Tabel 4.4	Uji Multikolinearitas .....	57
Tabel 4.5	Uji Autokorelasi .....	59
Tabel 4.6	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	60
Tabel 4.7	Hasil Analisis Uji t.....	61
Tabel 4.8	Anova.....	63
Tabel 4.9	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kemiskinan di Aceh .....	7
Gambar 1.2	APBA Provinsi Aceh .....	5
Gambar 1.3	Pengangguran Provinsi Aceh .....	6
Gambar 1.4	Inflasi di Provinsi Aceh .....	8
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 4.1	Grafik APBA, Pengangguran, Inflasi dan Kemiskinan Provinsi Aceh.....	55
Gambar 4.2	Scatterplots .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	APBA, Pengangguran, Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2006-2020 .....	73
Lampiran 2	Output Statistik dengan Aplikasi SPSS versi 20,0 .....	75
Lampiran 3	Titik Persentase Distribusi t.....	79
Lampiran 4	Titik Persentase Distribusi F.....	80
Lampiran 5	Tabel Durbin Watson.....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki tujuan pembangunan salah satunya pengentasan kemiskinan. Tujuan menilai efektivitas merupakan fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk penilaian berbagai jenis program pembangunan. Pemerintah baik pusat dan daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan.<sup>1</sup>

Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan kemiskinan secara tuntas.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan masalah bagi negara terutama pemerintah yang sedang berkuasa belum mampu untuk memberi kesejahteraan pada setiap lapisan masyarakat. Maka pemerintah perlu melakukan perhatian mengenai kemiskinan setiap tahun. Kemiskinan menjadi permasalahan bagi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kemiskinan dan

---

<sup>1</sup> Bappena, “Publikasi Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah”, [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2018%20Juli%202019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2018%20Juli%202019.pdf) diunduh 10 Oktober 2021.

<sup>2</sup> Melistika Indriana Telasari, Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia, (*Skripsi*: Universitas Islam Indonesia, 2017)

impikasi permasalahannya melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, dan sering kali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk manusia yang bersangkutan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun sering sekali tidak disadari kehadirannya oleh manusia yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Bagi pemerintah daerah kemiskinan juga merupakan permasalahan, dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung fasilitas (baik fisik seperti jalan, pelayanan kesehatan maupun non fisik berupa penyuluhan ekonomi, kesehatan, keamanan) untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di daerahnya. Pemimpin daerah baik provinsi, kabupaten dan kota semua mengupayakan agar masyarakatnya sejahtera dan kemiskinan terus dipangkas keberadaannya. Apabila kemiskinan tidak berkurang jumlah atau persentasenya, ada anggapan pemerintah tidak memperhatikan rakyat di daerahnya dan apabila masalah kemiskinan juga berdampak pada masalah yang kompleks seperti adanya kriminalitas (pencurian), pendidikan dapat menurun, kesehatan juga menurun dan tidak adanya rasa aman bagi masyarakat.

Kemiskinan telah memangkas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan mendapatkan semua kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Persoalan kemiskinan mempunyai dua dimensi seperti dimensi ekonomi dan

---

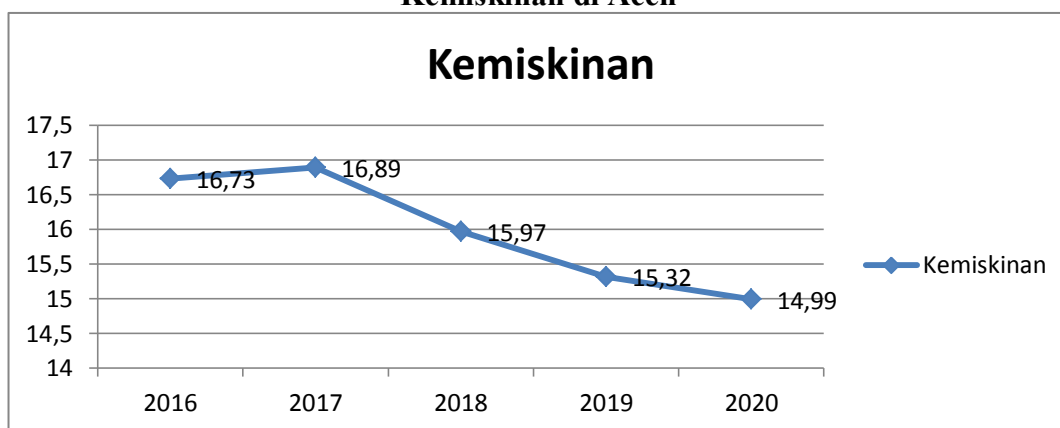
<sup>3</sup> Suliswanto, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Andi, 2014) hal 61



sosial. Dimensi ekonomi berhubungan dengan pendapatan perkapita masyarakat dan perekonomian di suatu negara, sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.<sup>4</sup> Gini rasio tahun 2017 sebesar 32,9%, tahun 2018 32,5%, tahun 2019 sebesar 31,9% dan terjadi peningkatan tahun 2020 menjadi sebesar 32,3%. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan fundamental sehingga dapat menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis program pembangunan.

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah paling barat Indonesia juga memiliki tingkat kemiskinan. Mengenai kemiskinan di Aceh dapat diketahui berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang mengalami kenaikan dan penurunan, seperti pada gambar berikut.

**Gambar 1.1**  
**Kemiskinan di Aceh**



Sumber: BPS Aceh, 2021

Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan atau artinya kemiskinan berkurang dan hal ini sesuai harapan bahwa kemiskinan terus

<sup>4</sup> Acep Kurniawan. Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, (*Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018)

menurun jumlahnya namun di tahun 2017 kemiskinan mengalami peningkatan atau jumlah masyarakat miskin bertambah di tahun 2017. Kemiskinan menurut T. Ahmad Dadek (Kepala Bappeda Aceh) kemiskinan di tahun 2020 berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pandemi telah meningkatkan persentase kemiskinan secara nasional dan juga di Aceh.<sup>5</sup>

Pemerintah Aceh dalam menurunkan kemiskinan terus membenahi kebijakan dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2002 dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dengan peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah dan komponen masyarakat dapat mengelola sumber daya dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan kemiskinan. Melalui peraturan tersebut daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam hal ini di Aceh diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya APBA merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi

---

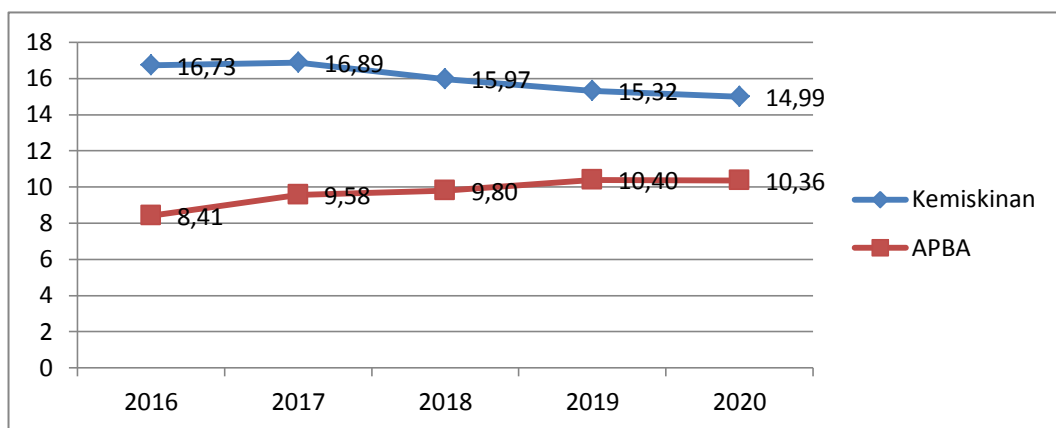
<sup>5</sup> Diskominfo Aceh, "Peningkatan angka kemiskinan", <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/peningkatan-angka-kemiskinan-di-aceh-masih-lebih-baik-dari-rata-rata-nasional>, diunduh 01 Januari 2022.

<sup>6</sup> Tutut Nurhidayah, Analisis Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menggunakan Statistical Mediation Analysis (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016), (*Skripsi* : Universitas Negeri Semarang, 2018)

daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. APBA diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah yang dimiliki.

APBA tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.2**  
**Kemiskinan dan APBA Provinsi Aceh**

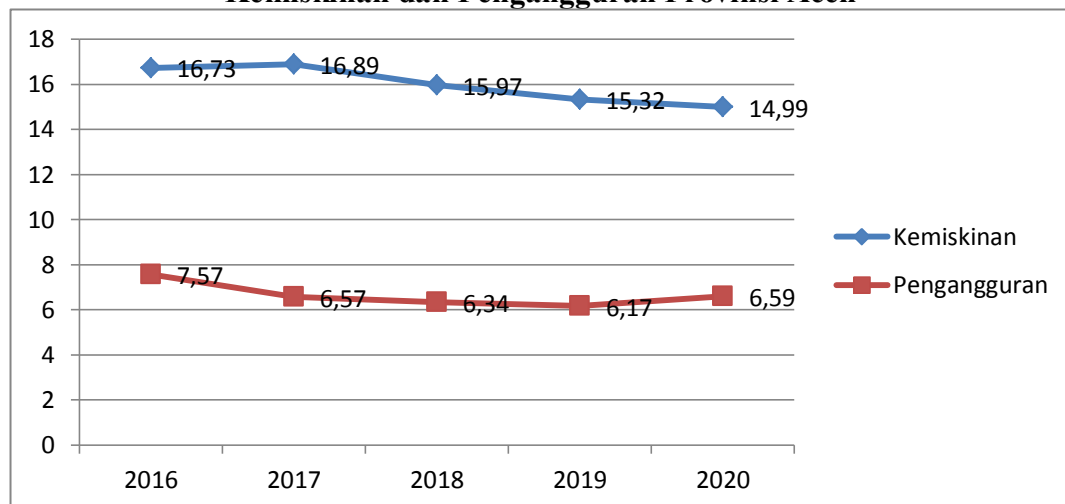


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa APBA dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja Aceh diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Aceh serta mengurangi kemiskinan. Namun kenaikan APBA belum seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan, karena pada tahun 2017 nilai APBA meningkat persentasenya menjadi 9,58% dari sebelum 8,41%. Seharusnya peningkatan APBA dapat menurunkan kemiskinan di tahun 2017. Namun persentase kemiskinan di tahun 2017 meningkat menjadi 16,89% dari tahun sebelumnya sebesar 16,73%.

Kemiskinan juga bersumber dari jumlah pengangguran atau masyarakat yang tidak memproduksi. Pengangguran timbul karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Angkatan kerja yang tidak bekerja salah satu alasannya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Bagi yang menganggur maka tidak adanya produktivitas dan tidak adanya pendapatan yang menyebabkan kemiskinan. Dalam hubungannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang tinggi justru akan memperparah tingkat kemiskinan.<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>8</sup> Tetapi berbeda dengan penelitian lainnya bahwa pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan.<sup>9</sup> Tingkat pengangguran yang dikaitkan dengan kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.3**  
**Kemiskinan dan Pengangguran Provinsi Aceh**



Sumber: BPS Aceh, 2021

<sup>7</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 142

<sup>8</sup> Diah Retnowati dan Harsuti, Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah, (*Jurnal Ekonomi*, Vol 3, No 2, 2016)

<sup>9</sup> Rukmanasari, Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo, (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

Gambar 1.3 memberikan informasi bahwa pengangguran di Provinsi Aceh tahun 2016-2019 mengalami penurunan, artinya pengangguran berkurang dan lebih banyak yang bekerja dan hal ini sesuai harapan daerah sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Tahun 2020 pengangguran meningkat dari 6,17% menjadi 6,59%, seharusnya pengangguran meningkat akan berdampak pada peningkatan kemiskinan, namun yang terjadi di tahun 2020 kemiskinan persentasenya menurun dari 15,32% menjadi 14,99%.

Inflasi juga dapat memberikan dampak pada peningkatan kemiskinan, dimana inflasi yang tinggi akan menaikkan harga-harga barang yang terus menerus. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli apabila berkelanjutan maka yang terjadi adalah peningkatan persentase kemiskinan. Demikian pada perusahaan dapat menurunkan produksi karena harga bahan baku tinggi dan mengurangi pekerja dan turut meningkatkan pengangguran.<sup>10</sup>

Inflasi merupakan sebuah proses meningkatnya harga-harga umum atau menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Inflasi ringan akan mengganggu perekonomian meskipun masih bisa ditoleransi. Inflasi moderat akan bersifat korosif meskipun tidak fatal, dan inflasi berkepanjangan atau *hyperinflation* akan sangat merusak proses perekonomian. Oleh karena itu inflasi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat serta menurunkan pendapatan.<sup>11</sup> Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap

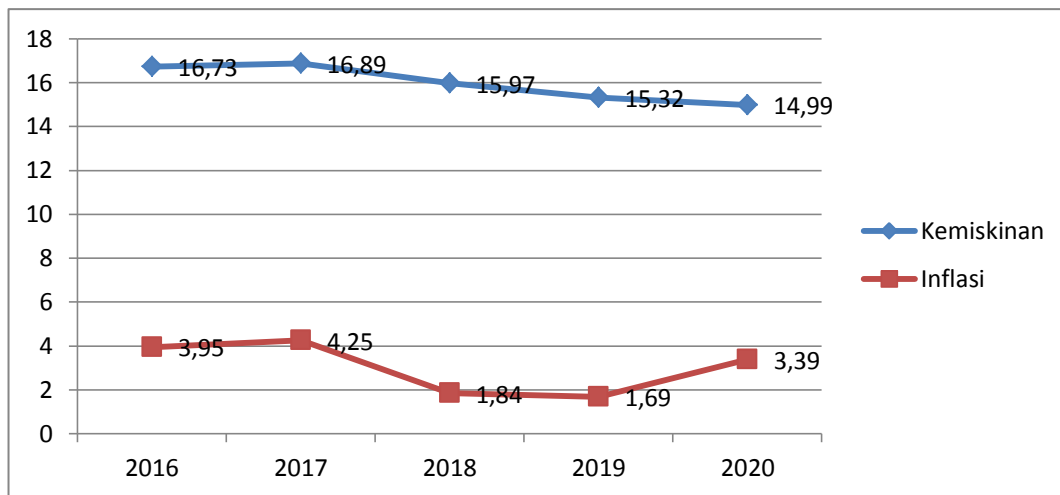
---

<sup>10</sup> Desrini Nisngsih, Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia, (*Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol 2 No 1, 2018) hal 53

<sup>11</sup> Hakim. T, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2015), hal. 42

kemiskinan.<sup>12</sup> Sementara pada penelitian lain inflasi tidak signifikan terhadap kemiskinan.<sup>13</sup> Inflasi di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.4**  
**Kemiskinan dan Inflasi di Provinsi Aceh**



Sumber: BPS Aceh, 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa inflasi mengalami fluktuasi sejak tahun 2016-2020. Inflasi daerah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menurun serta di ikuti penurunan persentase kemiskinan. Tetapi pada tahun 2020 persentase inflasi meningkat tetapi kemiskinan menurun persentasenya.

Dari uraian latar belakang peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2020 mengalami meningkat.

<sup>12</sup> Khairil Ihsan dan Ikhsan, Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol 3 No 3, 2018) hal 152

<sup>13</sup> Imelia, Pengaruh inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi, (*Jurnal Paradigma Ekonomi*, Vol 1, No 5, 2012)

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) terus mengalami peningkatan tetapi tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan, dengan meningkatnya APBA diharapkan dapat menurunkan kemiskinan, tetapi ditahun 2020 APBA meningkat tetapi kemiskinan turut meningkat.
3. Pengangguran tahun 2016-2019 mengalami penurunan tetapi tahun 2020 mengalami peningkatan dan berdampak dengan naiknya kemiskinan di tahun 2020 serta penelitian terdahulu yang hasilnya kontra.
4. Inflasi Aceh tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan dimana tahun 2017 inflasi meningkat dan tahun 2018 menurun sementara tahun 2020 kembali meningkat dan berdampak pada kemiskinan yang meningkat di tahun 2020 serta penelitian terdahulu yang hasil kontra.

### **1.3. Batasan Penelitian**

Adapun batasan penelitian ini hanya pada variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi sebagai variabel bebas dan kemiskinan sebagai variabel terikat. Kemudian data yang digunakan dari tahun 2016-2020 (5 tahun) yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik Aceh.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?

4. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, pengangguran dan inflasi secara simultan terhadap terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?

## **1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) terhadap terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi secara simultan terhadap terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak akademis terutama bagi para peneliti mahasiswa dalam menambah wawasan dan referensi tentang upah minimum provinsi, pengangguran dan inflasi serta kemiskinan.

2. Praktis

Adapun penulisan penelitian ini juga diharapkan bagi para praktisi dalam



memberikan informasi tentang pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan.

### 3. Penulis

Penelitian ini bagi penulis sangat bermanfaat karena menambah wawasan dan pengalaman yang sebelumnya peneliti tidak dapatkan. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan penulis informasi serta bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan.

## 1.6. Penjelasan Istilah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.<sup>14</sup>
2. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.<sup>15</sup>
3. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga–harga umum secara terus menerus. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa kenaikan satu atau beberapa pada suatu saat tertentu dan hanya “sementara” belum tentu menimbulkan inflasi. Gejala kenaikan umum yang cepat atau tinggi selama periode waktu tertentu disebut keadaan inflasi.<sup>16</sup>
4. Kemiskinan merupakan kondisi kurang mampu dari masyarakat dalam

---

<sup>14</sup> Undang-undang Keuangan Negara, 2002

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 142

<sup>16</sup> Masyhuri Machfudz, M. Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal. 181

memenuhi kebutuhan hidup paling dasar.<sup>17</sup>

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Pada sub bab sistematika penulisan ini merupakan bagaimana sistematika atau urutan penulisan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun penjelasan perbab adalah sebagai berikut :

Pada bab I berisikan mengenai pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penulisan dan manfaat penulisan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II berisikan mengenai teori Upah Minimum Provinsi, Pengangguran dan Inflasi serta Kemiskinan.

Pada bab III berisikan mengenai Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Uji Hipotesis dan Variabel Penelitian.

Pada bab IV berisikan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Analisis Data, uji Asumsi Klasik, Uji Regresi dan Hipotesis dan Interpretasi Hasil Penelitian.

Pada bab V berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

---

<sup>17</sup> Soekirno Sadono, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 189

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

##### **2.1.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.<sup>18</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur yaitu rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas daerah tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan daerah, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.<sup>19</sup>

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan

---

<sup>18</sup> Undang-undang Keuangan Negara, 2002

<sup>19</sup> Halim, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah.<sup>21</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah.<sup>22</sup>

### **2.1.2. Struktur dalam APBD**

Laporan APBD yang memakai format Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut ini penjelasan dari 3 (tiga) bagian laporan APBD:

#### **1. Pendapatan**

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **2. Belanja**

Belanja digolongkan menjadi 4 kategori yaitu belanja aparatur daerah (terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan,

---

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

<sup>22</sup> Lasminingsih, *Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hal. 223

dan belanja modal/pembangunan), belanja pelayanan publik (terdiri dari belanja administrasi umum belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal), belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak disangka.

### 3. Pembiayaan.

Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu penerimaan pinjaman dan obligasi hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

#### **2.1.3. Penggolongan APBD**

Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.<sup>23</sup> Selanjutnya Belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal. Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber -

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 224

sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.<sup>24</sup>

## **2.2. Pengangguran**

### **2.2.1. Pengertian Pengangguran**

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.<sup>25</sup> Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.<sup>26</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima

---

<sup>24</sup> Moekijat, *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: BPFE YKPN, 2011), hal. 14

<sup>25</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 142

<sup>26</sup> Mankiw, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal. 126

bekerja tetapi belum mulai bekerja.<sup>27</sup>

Pengangguran akan mengakibatkan tidak optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat sebagian potensi dari faktor produksi tidak dimanfaatkan. Kelompok pengangguran akan menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang bekerja sehingga tingkat ketergantungannya akan menjadi tinggi sedangkan tingkat pendapatan perkapita akan merosot.<sup>28</sup>

### 2.2.2. Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran dapat digolongkan dalam 3 jenis, sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional tidak bisa dielakkan dari perekonomian yang sedang berubah. Untuk beberapa alasan, jenis-jenis barang yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, begitu pula permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut.

#### 1. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural terjadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan

---

<sup>27</sup> Sirusa BPS, "Pengangguran", <http://sirusa.bps.go.id/indeks.php?indikator/wiew&id=44>, diunduh 21 Januari 2021

<sup>28</sup> Qaradhawi, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 6

<sup>29</sup> Mankiw G, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal. 126

perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketrampilan baru tersebut.

## 2. Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat.

Klasifikasi pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok:<sup>30</sup>

### 1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

### 2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal

---

<sup>30</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 142



karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

### 3. Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

### 4. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabial dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

Pengangguran dapat di bagi menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah (karena terpaksa) dan pengangguran khiyariyah (karena pilihan). Kedua jenis pengangguran ini mempunyai posisi dan hukumnya masing-masing dalam syari<sup>h</sup>.<sup>31</sup>

#### 1. Pengangguran Jabariyah (karena terpaksa) adalah pengangguran dimana

---

<sup>31</sup> Qaradhawi, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 6

seorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang yang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa digali dan di pelajari sejak kecil. Atau dia mempunyai keterampilan tetapi itu semua tidak berguna karena berubahnya lingkungan dan zaman. Atau dia sudah mempunyai keterampilan akan tetapi dia tidak dapat memanfaatkan karena kurangnya alat atau modal yang di butuhkan. Contoh ada seseorang yang ahli dalam bertani, tetapi dia tidak mempunyai alat untuk membajak ataupun sepetak lahan untuk dia garap.

2. Pengangguran Khiyariyah (karena pilihan) adalah seseorang yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak mengusahakan suatu pekerjaan sehingga menjadi “sampah masyarakat”. Islam sangat memerangi orang-orang seperti ini, walaupun dari mereka ada yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan pekerjaan dunia untuk mengkonsentrasikan diri dalam beribadah kepada Allah.

### **2.2.3. Dampak Buruk Pengangguran**

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu:<sup>32</sup>

1. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas

---

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 514

dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.

## 2. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:

- a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.
- b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

## 2.3. Inflasi

### 2.3.1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga–harga umum secara terus menerus. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa kenaikan satu atau beberapa pada suatu saat tertentu dan hanya “sementara” belum tentu menimbulkan inflasi. Gejala kenaikan umum yang cepat atau tinggi selama periode waktu tertentu disebut keadaan inflasi.<sup>33</sup> Angka inflasi sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi selalu menjadi pusat perhatian orang. Paling tidak turunnya angka inflasi mencerminkan gejolak ekonomi di suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi jelas merupakan hal yang sangat merugikan bagi perekonomian negara. Pengalaman menunjukkan bahwa dibelahan dunia ketiga, keadaan perekonomian yang tidak menguntungkan (buruk) telah memacu tingkat inflasi yang tinggi dan pada gilirannya akan menjadi malapetaka bagi masyarakat

---

<sup>33</sup> Masyhuri Machfudz, M. Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal. 181

terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus.<sup>34</sup> Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Meskipun hampir semua orang mengenal istilah atau paling tidak merasakan gejala inflasi dalam kehidupan namun sering kali pengertiannya kabur, definisi yang benar adalah gejala atau keadaan naiknya tingkat biaya dan harga, yaitu naiknya harga-harga roti, bensin, mobil, naiknya upah, harga tanah, sewa barang-barang modal dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Jadi merupakan kenaikan secara umum barang-barang dan jasa serta faktor-faktor produksi. Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi. Menurut para ekonom modern inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).<sup>36</sup> Pemahaman awal tentang inflasi lebih menekankan pada nilai uang.

---

<sup>34</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: LPP FE UI, 2012), hal. 170

<sup>35</sup> Masyhuri Machfudz, M. Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal. 181

<sup>36</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 135

Keseluruhan tingkat harga dalam perekonomian dapat dipandang dari dua sisi, yaitu tingkat harga sebagai harga sejumlah barang dan jasa. Ketika tingkat harga naik maka orang harus membayar lebih untuk membeli barang dan jasa. Sebagai alternatif, kita memandang tingkat harga sebagai ukuran nilai uang. Kenaikan tingkat harga berarti nilai uang menjadi lebih rendah. Apabila hal ini diungkapkan secara matematis, maka anggaplah  $P$  sebagai tingkat harga yang diukur, misal oleh indeks harga konsumen atau deflator PDB. Maka,  $P$  mengukur jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa. Jika dibalik, maka jumlah barang dan jasa dapat diperoleh dengan \$ 1 adalah  $1/P$ . Dengan kata lain, bila  $P$  merupakan harga barang dan jasa yang diukur dalam nilai uang, maka  $1/P$  merupakan nilai uang yang diukur dalam barang dan jasa. Ini berarti ketika tingkat harga keseluruhan naik, maka nilai uang jatuh.<sup>37</sup> Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn alMaqrizi (1364M-1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu inflasi alami dan inflasi kesalahan manusia.<sup>38</sup>

### **2.3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Inflasi**

Terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan penyebab terjadi inflasi yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.

---

<sup>37</sup> Mankiw Gregori N, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal. 195

<sup>38</sup> Khairil Ihsan dan Ikhsan, Analisis Pengaruh UMP, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Aceh, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3 No 3, 2018)

<sup>39</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: LPP FE UI, 2014), hal. 359

2. Bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.
3. Berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Ada beberapa sebab yang dapat menimbulkan inflasi antara lain: <sup>40</sup>

1. Pemerintah yang terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang berlaku.
2. Berbagai golongan ekonomi dalam masyarakat berusaha memperoleh tambahan pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan produktivitas mereka.
3. Adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan keluarannya (output) yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan.
4. Adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi yang mendorong kenaikan harga.
5. Pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga.
6. Pengaruh inflasi luar negeri, khususnya bila Negara yang bersangkutan mempunyai sistem perekonomian terbuka. Pengaruh inflasi luar negeri ini akan terlihat melalui pengaruh terhadap harga-harga barang impor.

---

<sup>40</sup> Marisa dan Haryadi, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2016), hal. 8

### 2.3.2. Jenis-jenis Inflasi

Inflasi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis:<sup>41</sup>

1. Inflasi berdasarkan tingkatan, terdiri dari:
  - a. Inflasi ringan yaitu dibawah 10% setahun.
  - b. Inflasi sedang yaitu antara 10%-30% setahun
  - c. Inflasi berat yaitu antara 30%-100% setahun
  - d. Hiperinflasi atau tidak terkendali yaitu diatas 100% setahun
2. Inflasi berdasarkan sebab-sebabnya, terdiri dari:
  - a. *Demand inflation* yaitu inflasi yang timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Disebabkan oleh beberapa hal seperti bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang, kenaikan permintaan ekspor dan bertambahnya pengeluaran inflasi swasta karena kredit murah.
  - b. *Cost inflation* yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi, misalnya karena naiknya bahan bakar minyak.
3. Inflasi berdasarkan tempat asalnya:
  - a. Inflasi berasal dari dalam negeri  

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul karena terjadinya deficit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.
  - b. Inflasi berasal dari luar negeri

---

<sup>41</sup> Marisa dan Haryadi, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2016) hal 8



Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul sebagai akibat dari kenaikan harga barang impor. Hal ini terjadi karena tingginya biaya produksi barang di luar negeri atau adanya kenaikan tariff impor barang.

## **2.4. Kemiskinan**

### **2.4.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>42</sup> Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan (*porper*) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>43</sup>

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia,

---

<sup>42</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, Erlangga, 2016) hal 280

<sup>43</sup> Tri Wibowo Budi Santoso & Hadi Susilo, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hal 252

hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>44</sup>

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan minimum, yang dikenal sebagai garis batas kemiskinan atau garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yaitu: garis kemiskinan makanan dan non makanan. Menurut Badan Pusat Statistik, nilai standar kebutuhan minimum makanan mengacu pada harga dan tingkat konsumsi dari 52 jenis bahan makanan dengan batas kecukupan makanan yang mampu menghasilkan energi 2.100 kalori/kapita /hari, sedangkan non makanan terdiri dari 27 paket komoditi untuk perkotaan dan 25 komoditi untuk perdesaan yang dalam hal ini mewakili pola konsumsi penduduk kelas bawah, dengan batas kecukupan non makanan ditetapkan sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan oleh penduduk kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum non makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan aneka barang jasa lainnya.<sup>45</sup>

Penduduk miskin atau penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah individu dengan pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan. Kriteria

---

<sup>44</sup> *Ibid...*

<sup>45</sup> Badan Pusat Statistik, 1999.

penduduk miskin menurut BPS sebagai berikut:

1. Luas lantai perkapita :  $\leq 8 \text{ m}^2$
2. Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/bersama- sama dengan rumah tangga lain
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum/ketersediaan air bersih : air hujan/ sumur / mata air tidak terlindung
7. Bahan bakar memasak sehari- hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani : dengan luas lahan  $500\text{m}^2$ , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel tak terpenuhi maka

dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.<sup>46</sup>

#### 2.4.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi:<sup>47</sup>

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Menurut rencana kerja pemerintah bidang prioritas penanggulangan kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Pengeluaran pemerintah dalam APBD mencerminkan kebijakan pemerintahan suatu daerah. Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang

---

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik, "Kategori Kemiskinan", diunduh 21 Januari 2021.

<sup>47</sup> Kuncoro Mudarajad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta, UPP YKPN, 2010) hal 111

besar tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi, serta peningkatan pendapatan per kapita.<sup>48</sup>

Faktor faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya adalah, pengangguran penduduk. Permasalahan pengangguran dapat menyebabkan ketidakmerataan perolehan pendapatan Pengangguran tenaga kerja karena lapangan pekerjaan yang tidak mendukung menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Kemudian inflasi yang dapat menurunkan angka kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran. Pada saat inflasi meningkat maka pengangguran berkurang dan sebaliknya.<sup>49</sup>

### 2.4.3 Indikator Kemiskinan

Bappenas dalam Sahlan mengemukakan indikator kemiskinan, berupa:<sup>50</sup>

1. Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak
2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup
5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi
6. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah
7. Akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas

Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat

---

<sup>48</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2004) hal 20

<sup>49</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hal 92

<sup>50</sup> *Ibid...*

sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum.<sup>51</sup>

## 2.5. Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode / Perbedaan penelitian	Hasil
1	Intan Permata Sari Br Sembiring, Surtama Simanjuntak dan Vini Alvionita Br Sitepu	Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara tahun 2006-2020	Regresi linier berganda. Perbedaan penelitian tidak terdapat variabel upah minimum	Hasil penelitian diketahui inflasi dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. <sup>52</sup>
2	Rukmanasari	Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo	Regresi linier berganda. Perbedaan tidak terdapat variabel inflasi	Hasil penelitian bahwa upah minimum dan pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan <sup>53</sup>
3	Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia	Pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Indonesia	Regresi linier berganda. Perbedaan tidak menggunakan variabel kemiskinan	Hasil penelitian inflasi dan IPM berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan upah minimum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengangguran. <sup>54</sup>

<sup>51</sup> *Ibid...*

<sup>52</sup> Intan Permata Sari Br Sembiring, Surtama Simanjuntak dan Vini Alvionita Br Sitepu, Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara tahun 2006-2020, (*Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol 2, No 2, 2021)

<sup>53</sup> Rukmanasari, Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

<sup>54</sup> Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia, Pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Indonesia (*Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol 5. No.2, 2021)

4	Diah Retnowati dan Harsuti	Pengaruh Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah	Regresi Linier berganda. Perbedaan penelitian tidak ada inflasi dan upah minimum	Hasil penelitian pengangguran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. <sup>55</sup>
5	Imelia	Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi	Regresi Linier sederhana. Perbedaan tidak terdapat variabel upah minimum dan pengangguran	Hasil penelitian inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. <sup>56</sup>
6	Khairil Ihsan dan Ikhsan	Analisis Pengaruh UMP, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Aceh	Regresi linier berganda. Perbedaan penelitian menggunakan data kabupaten dan kota	Hasil penelitian diketahui bahwa UMP berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sementara inflasi dan pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan. <sup>57</sup>
7	T Nurhidayah dan P Hendikawati	Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan <i>Statistical Mediation Analysis</i>	Metode : <i>Statistical Mediation Analysis</i> . Perbedaan pada metode analisis data	Hasil penelitian PAD dan DAK berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan APBD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. <sup>58</sup>
8	Debby Ch, Rotinsulu, Avriano R, Luciana	Analisis Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara	Regresi linier. Perbedaan penelitian menggunakan pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian, anggaran pendapatan belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta pengangguran. <sup>59</sup>

<sup>55</sup> Diah Retnowati dan Harsuti, Pengaruh Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, (*Journal of Economic and Business* Vol 1. No.5, 2017)

<sup>56</sup> Imelia, Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, (*Jurnal Paradigma Ekonomika*, 2012)

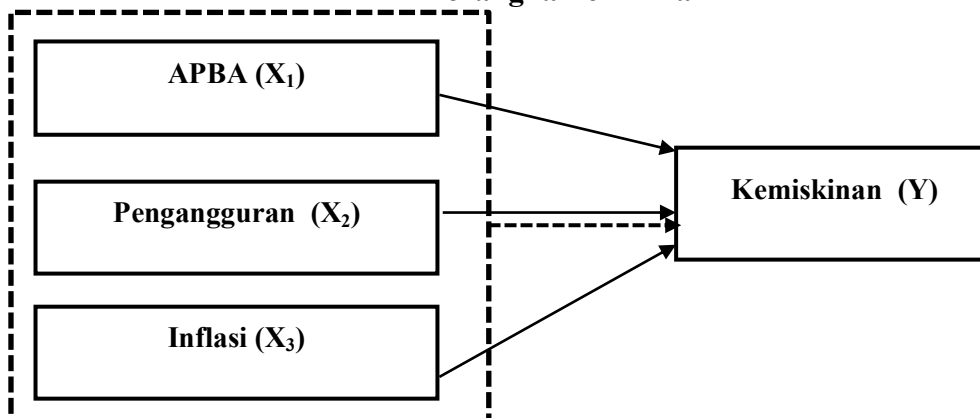
<sup>57</sup> Khairil Ihsan dan Ikhsan, Analisis Pengaruh UMP, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Aceh, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3 No 3, 2018)

<sup>58</sup> T Nurhidayah dan P Hendikawati, Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan *Statistical Mediation Analysis*, (*Jurnal Mipa*, Vol 41 No 2, 2018)

<sup>59</sup> Debby Ch, Rotinsulu, Avriano R, Luciana, Analisis Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara, (*Jurnal Ekonomi*, Vol 4 No 2, 2018)

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



## 2.7. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini:

1. H<sub>01</sub> : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.  
 H<sub>a1</sub> : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
2. H<sub>02</sub> : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh  
 H<sub>a2</sub> : Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
3. H<sub>03</sub> : Inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh  
 H<sub>a3</sub> : In inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
4. H<sub>04</sub> : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh  
 H<sub>a4</sub> : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sehingga yang menjadi lokasi penelitian adalah Provinsi Aceh dengan cara mengunduh data Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, pengangguran, inflasi dan kemiskinan. Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian dari bulan Oktober 2021 sampai selesai.

#### **3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif jenis asosiatif yang merupakan penelitian berdasarkan falsafah positivisme yaitu ilmu yang valid, konkrit, objektif, teramati, terukur, rasional dan sistematis.<sup>60</sup> Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka, lalu diolah dengan rumus statistik tertentu, dan diinterpretasikan dalam rangka menguji hipotesis yang telah disiapkan lebih dahulu, serta lazim bertujuan mencari sebab akibat sesuatu. penelitian kuantitatif cenderung meneliti lebih dari satu variabel.<sup>61</sup> Penelitian ini bersifat asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 12

<sup>61</sup> Sukidin dan Mundir, *Metodologi Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan* (Surabaya: Insan Cendekia, 2015), hal. 23

akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.<sup>62</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, pengangguran, inflasi dan kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2006 sampai dengan 2020, yang dapat diakses melalui [www.aceh.bps.go.id](http://www.aceh.bps.go.id).

### 3.2.2 Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta maupun angka. Pendapat lain menyatakan bahwa data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah obyek. Data menerangkan obyek-obyek dalam variabel tertentu.<sup>63</sup> Data berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.<sup>64</sup>

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun

---

<sup>62</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 16

<sup>63</sup> Purwanto, *Statistik untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 41

<sup>64</sup> Tika Moh Pabundu, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hal. 57

dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan.<sup>65</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder data upah minimum provinsi, pengangguran, inflasi dan kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada website [www.aceh.bps.go.id](http://www.aceh.bps.go.id) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

### **3.3. Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>66</sup> Definisi lain dari populasi adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.<sup>67</sup> Populasi pada penelitian ini Provinsi Aceh dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, pengangguran, inflasi dan kemiskinan dari tahun 2006-2020 atau  $n = 15$ .

#### **3.3.2. Sampel**

Sampel adalah sebagian saja dari seluruh jumlah populasi, yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi.<sup>68</sup> Metode penentuan sampel menggunakan sensus yaitu menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini adalah Provinsi Aceh dengan data pengangguran,

---

<sup>65</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hal. 147

<sup>66</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 130

<sup>67</sup> Bungin Burhan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 109

<sup>68</sup> *Ibid* hal. 141

inflasi dan kemiskinan serta dari DJPK data Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dari tahun 2006-2020 atau  $n = 15$ .

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari:

#### **3.4.1. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>69</sup> Data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

#### **3.4.2. Metode Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan, dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah, dapat dibagi menjadi kategori yaitu buku utama dan buku penunjang. Apabila buku-buku yang ada diperpustakaan tersebut relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan, materi demikian merupakan buku utama.<sup>70</sup> Data yang diambil penulis dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, buku-buku literatur, dan penelitian sejenisnya.

---

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 274

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.

### 3.5. Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel

#### 3.5.1. Identifikasi Variabel

##### 1. Variabel dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu kemiskinan di Provinsi Aceh. Data kemiskinan yang akan diteliti adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak BPS Provinsi Aceh dari tahun 2006-2020.

##### 2. Variabel Independen

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja aceh dari website DJPK serta pengangguran dan inflasi dari website BPS Provinsi Aceh dari tahun 2006-2020.

#### 3.5.2. Operasionalisasi Variabel

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Jenis Data	Satuan
APBA ( $X_1$ )	Nominal	Rupiah
Pengangguran ( $X_2$ )	Nominal	Persen
Inflasi ( $X_3$ )	Nominal	Persen
Kemiskinan ( $Y$ )	Nominal	Persen

### 3.6. Metode Analisis Data

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian pada regresi untuk menghindari penyimpangan model regresi dan untuk mendapatkan model regresi yang akurat. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengolahan data menggunakan aplikasi statistic SPSS versi 20 for windows.

##### a. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Ghozali menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.<sup>71</sup>

Uji normalitas lain menggunakan uji statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan Uji K-S dapat dilihat dari:

- Jika nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.
- Jika nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas  $> 0,05$  maka

---

<sup>71</sup> Ghozali Imam, *Analisis Multivariat*, (Semarang, BP Undip, 2013) hal 160

data berdistribusi normal.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).<sup>72</sup> Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Pengujian:

multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- Tolerance value  $< 0,10$  atau  $VIF > 10$  : terjadi multikolinearitas.
- Tolerance value  $> 0,10$  atau  $VIF < 10$  : tidak terjadi multikolinearitas

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak tetap maka disebut heterokedastisitas.

Dasar analisis heterokedastisitas menurut Ghozali adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

---

<sup>72</sup> *Ibid ... hal 115*

<sup>73</sup> *Ibid ... hal 108*

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.

2. Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (W test).

<sup>74</sup> Pengambilan keputusan:

**Tabel 3.2**  
**Pengambilan Keputusan ada tidaknya Autokorelasi**

Keterangan	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokoeralasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif	Tidak ditolak	$Du < d < 4-du$

2. Persamaan regresi linier berganda

Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis regresi

---

<sup>74</sup> Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2016) hal. 110.



berganda:<sup>75</sup>

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan

a = Konstanta

X<sub>1</sub> = Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA)

X<sub>2</sub> = Pengangguran

X<sub>3</sub> = Inflasi

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien regresi

### 3.6.1. Uji Hipotesis

#### 1. Uji signifikan secara individual (uji statistik t).<sup>76</sup>

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha = 0.05$  (5%). Pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji t pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut:<sup>77</sup>

a. Jika nilai sig >  $\alpha$  maka Ho diterima

b. Jika nilai sig <  $\alpha$  maka Ha diterima

#### 2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 267

<sup>76</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 98

<sup>77</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), hal. 98

Uji F atau uji model secara keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau model diterima.

1. Jika nilai sig > 0.05 maka Ho diterima
2. Jika nilai sig < 0.05 maka Ha diterima.

### 3.5.2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing masing variabel yang digunakan. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil mengindikasikan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk dilakukannya prediksi terhadap variabel dependen. Adapun formula untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

$$K_d = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

$K_d$  = Koefisien determinasi

$R^2$  = Koefisien korelasi ganda

---

<sup>78</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 21*(Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), hal. 97

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh**

Aceh merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Indonesia. Letak geografis daerah Aceh dikelilingi oleh perairan, baik samudra hindia dan juga selat malaka. Jalan darat adalah melalui jalan lintas Sumatera yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Aceh memiliki ketergantungan pada daerah Provinsi Sumatera Utara karena merupakan salah satu penghubung dengan daerah lain yang ada di Sumatera melalui darat.

Sejarahnya bahwa Provinsi Aceh sebelumnya bernama Daerah Istimewa Aceh, namun diubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan saat ini disebut dengan Pemerintah Aceh. Aceh merupakan salah satu dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia memang memiliki keunikan dan keistimewaan. Provinsi yang lahir pada tanggal 26 Mei 1959 ini memiliki keistimewaan, yaitu istimewa dalam hal pendidikan, adat, dan agama. Secara administratif Aceh kini terdiri terdiri dari 5 kota dan 18 kabupaten. Wilayah Aceh berbatasan disebelah utara dengan selat malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan selat malaka dan sebelah barat dengan samudra hindia.<sup>79</sup>

Perekonomian di Aceh terdapat beberapa sektor diantaranya adalah:

---

<sup>79</sup> Wikipedia, "Pemerintah Aceh", <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diunduh 10 Februari 2022

1. Sektor Pertanian, yang terdiri dari:<sup>80</sup>
  - a. Subsektor tanaman pangan; pembangunan pada subsektor ini diarahkan pada peningkatan produksi tanaman padi dan palawija dalam rangka mempertahankan swasembada pangan.
  - b. Subsektor tanaman perkebunan; pengembangan pada subsektor ini diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi tanaman perkebunan terutama yang mudah dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan devisa negara dari hasil ekspor.
  - c. Subsektor peternakan dan hasilnya; pembangunan pada subsektor ini diarahkan pada peningkatan produksi daging, telur, dan susu untuk memenuhi gizi masyarakat.
  - d. Subsektor kehutanan; kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan kayu, pengambilan hasil-hasil hutan dan perburuan binatang.
  - e. Subsektor perikanan; pembangunan pada subsektor ini diarahkan untuk peningkatan produksi dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat.
2. Sektor Pertambangan dan Galian
  - a. Subsektor tanpa migas; meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik dibawah maupun pada permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan memanfaatkan biji logam dan hasil tambang lainnya.
  - b. Subsektor penggalian; mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian batu-batuan, pasir besi, biji besi, biji perak serta komoditas

---

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik, "Sektor PDRB", [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diunduh 10 Februari 2022

barang tambang lainnya selain kegiatan yang tercakup yaitu penggalian batu-batuan, pasir, tanah, batu gunung, batu kali, batu kapur, batu koral, kerikil, dan batu marmer.

### 3. Sektor Industri Pengolahan

Pembangunan pada bidang ini terutama diarahkan untuk industri pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan limbah pertanian, industri rumah tangga, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Penekanan pembangunan pada industri selain untuk meningkatkan produksi tapi juga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

### 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air minum, terdiri dari:

- a. Subsektor listrik; meliputi pembangunan dan penyaluran tenaga listrik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun non PLN. Yang dimaksud non PLN adalah perusahaan listrik yang dilakukan oleh perusahaan swasta atau perorangan.
- b. Subsektor air minum; kegiatan ini meliputi proses pembersihan, pemurnian, dan proses kimia lain untuk menghasilkan air minum termasuk penyaluran melalui pipa baik pada rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta.

### 5. Sektor Bangunan

Kegiatan ini meliputi usaha pembangunan atau pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan berat dan ringan, perombakan bangunan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan konstruksi.

6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, yang terdiri dari:
  - a. Subsektor perdagangan besar dan eceran; subsektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian di Provinsi Aceh, karena mendorong pertumbuhan dan perkembangan produksi. Perdagangan mampu menjamin kelancaran pemasaran dan pembelian jasa dari konsumen ke produsen.
  - b. Subsektor perhotelan; kegiatan ini meliputi penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau keseluruhan bangunan berupa tempat penginapan, baik yang terbuka untuk umum atau hanya sebahagian anggota kelompok organisasi tertentu. Termasuk pula aktivitas penyediaan Makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu penginapan, yang seluruh kegiatan tersebut berada dalam suatu kesatuan manajemen penginapan.
  - c. Subsektor restoran; kegiatan ini mencakup usaha penjualan unuk penyediaan makanan atau minuman, yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan di suatu tempat tersendiri ataupun dijajakan.
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi terdiri dari:
  - a. Subsektor angkutan darat; meliputi angkutan jalan raya sebagai jasa penunjang angkutan darat seperti parker dan terminal. Akan tetapi yang termasuk dalam hitungan hanya terbatas pada segala jenis angkutan jalan raya seperti angkutan bus, truk, becak dan angkot.

- b. Subsektor angkutan laut; meliputi kegiatan pelayanan samudera, perairan pantai, sungai dan jasa penumpang angkutan laut. Namun, yang termasuk dalam hitungan hanya terbatas angkutan perairan pantai saja.
  - c. Subsektor komunikasi; kegiatan jasa komunikasi untuk umum seperti pengiriman surat, paket, dan wesel yang diusahakan oleh Perum Pos dan Giro, pengiriman berita dengan menggunakan telepon, telex, dan telegram yang diusahakan oleh Perum Telekomunikasi.
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, yang terdiri dari:
- a. Subsektor keuangan (bank), kegiatan ini meliputi jasa pelayanan di bidang keuangan kepada pihak lain, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, memberi pinjaman, mengirim uang, memindahkan rekening koran, membeli atau menjual surat-surat berharga, dan memberi jaminan bank.
  - b. Subsektor keuangan non bank; meliputi pelayanan asuransi baik jiwa maupun bukan jiwa seperti asuransi kebakaran, kecelakaan, kerusakan dan sebagainya. Termasuk juga agen perasuransian, unit penyaluran dana pensiun dan sebagainya.
  - c. Subsektor persewaan dan jasa perusahaan; meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain seperti jasa hukum, jasa angkutan, jasa periklanan, jasa penyewaan mesin dan peralatan, jasa bangunan dan jasa arsitek. Tetapi yang termasuk dalam perhitungan terbatas pada jasa hokum (advokat/pengacara), notaris dan jasa konsultan.

9. Sektor Jasa, terdiri dari:

- a. Pemerintah Umum; meliputi jasa pelayanan sosial seperti rumah sakit umum dan panti asuhan
- b. Swasta, meliputi:
  - 1) Subsektor jasa sosial kemasyarakatan; meliputi jasa pendidikan dan pendidikan swasta mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, termasuk guru perorangan yang berusaha sendiri dari kursus-kursus. Jasa kesehatan mencakup panti asuhan, rumah ibadah dan sebagainya.
  - 2) Subsektor kebudayaan dan hiburan; meliputi segala macam perusahaan dan lembaga swasta yang bergerak pada jasa hiburan, rekreasi serta kebudayaan seperti pembuatan dan distribusi film, usaha penyiaran film dan penyiaran radio swasta. Dari jenis kegiatan tersebut diatas, yang termasuk dalam perhitungan terbatas pada kegiatan pemutaran film dan penyiaran radio swasta.
  - 3) Subsektor perorangan dan rumah tangga; meliputi jasa yang diberikan untuk perorangan dan rumah tangga seperti reparasi, jasa binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang las dan jasa perorangan lain.

Sektor-sektor tersebut mendukung perekonomian di Aceh dan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan. Sektor ini juga perlu didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sehingga setiap sektor terdukung. Kemudian dengan adanya sektor tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran



serta mengurangi kemiskinan. Tetapi untuk angka inflasi perlu di kecilkan sehingga tidak mempengaruhi kondisi perekonomian dan dapat meningkatkan daya beli sehingga kemiskinan berkurang. Berbicara tentang kemiskinan maka dapat diketahui jumlah penduduk Aceh sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 5.274.871 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin sampai dengan September 2020 adalah sebanyak 833.910 jiwa.<sup>81</sup>

#### 4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data berupa investasi, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Data tersebut diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Data dapat di lihat rata-rata (mean), nilai tertinggi, nilai terendah dan juga standar deviasi.

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
LogAPBA	15	6,50	7,19	6,9574	,20484
LogPengangguran	15	,79	1,02	,9172	,08096
LogInflasi	15	-,66	1,08	,5646	,44039
LogKemiskinan	15	1,18	1,45	1,2819	,08481
Valid N (listwise)	15				

Sumber : Data Sekunder Penelitian, diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui nilai n atau jumlah data dari masing-masing variabel adalah 15. 15 data untuk Anggaran Pendapatan Belanja Aceh ( $X_1$ ) nilai minimum sebesar 6,50, nilai maksimum sebesar 7.19, dari periode

<sup>81</sup> BPS Aceh, "Penduduk Miskin", <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabkota-di-aceh.html>, diunduh 10 Februari 2022

2006-2020 diketahui nilai mean sebesar 6.9574, serta nilai standar deviasi sebesar 0,20484 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Pengangguran ( $X_2$ ) dari 15 data diketahui bahwa nilai minimum sebesar 0,79 nilai maksimum sebesar 1,02 nilai mean dari periode 2006-2020 sebesar 0,9172 serta nilai standar deviasi sebesar 0,08096 artinya nilai mean pengangguran periode 2006-2020 lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Inflasi ( $X_3$ ) dari 15 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar -0,66 yang nilai maksimum sebesar 1,08, nilai mean dari periode 2006-2020 sebesar 0,5646, serta nilai standar deviasi sebesar 0,44039 artinya nilai mean periode 2006-2020 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah atau maka penyebaran nilainya merata.

Kemiskinan ( $Y$ ) diketahui bahwa nilai minimum sebesar 1,18 yang nilai maksimum sebesar 1.45, nilai mean dari periode 2006-2020 sebesar 1,2819, serta nilai standar deviasi sebesar 0,08481 artinya nilai mean periode 2006-2020 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Berdasarkan data penelitian yang terdiri dari variabel bebas (APBA, pengangguran dan inflasi) serta variabel terikat kemiskinan. Data yang digunakan pada penelitian ini sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Data-data penelitian hanya APBA yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hanya tahun 2007 menurun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus

berupaya untuk mengurangi kemiskinan melalui belanja Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh dapat di deskripsikan sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**APBA, Pengangguran, Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh**  
**Tahun 2006-2020**

No	Tahun	APBA (Rp /jutaan)	Pengangguran (%)	Inflasi (%)	Kemiskinan (%)
1	2006	4.929.000	10,43	9,98	28,28
2	2007	3.165.343	9,84	9,41	26,65
3	2008	6.644.765	9,56	11,92	23,53
4	2009	6.732.212	8,71	3,72	21,8
5	2010	6.244.669	8,37	5,86	20,98
6	2011	7.089.390	7,43	3,43	19,57
7	2012	8.714.808	9,1	0,22	19,46
8	2013	10.111.367	10,3	7,31	17,6
9	2014	11.164.409	9,02	8,09	17,72
10	2015	12.010.743	9,93	1,53	16,98
11	2016	12.551.166	7,57	3,95	16,73
12	2017	14.291.939	6,57	4,25	16,89
13	2018	14.622.475	6,34	1,84	15,97
14	2019	15.523.728	6,17	1,69	15,32
15	2020	15.457.220	6,59	3,39	14,99

Sumber: data sekunder penelitian, diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2006-2020 yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2006 besaran APBA Provinsi Aceh Rp 4.929.000,000, tahun 2007 sebesar Rp 3.165.343.000 atau menurun dari tahun sebelumnya, tahun 2008 sebesar Rp 6.644.765.000, tahun 2009 sebesar Rp 6.732.212.000, tahun 2010 sebesar Rp

6.244.669.000, tahun 2011 sebesar Rp 7.089.390.000 dan 2012 sebesar Rp 8.714.808.000, tahun 2013 APBA sebesar Rp 10.111.367.000 dan kemudian tahun 2014 sebesar Rp 11.164.409.000, tahun 2015 APBA menjadi sebesar Rp 12.010.743.000, tahun 2016 sebesar Rp 12.551.166.000 serta tahun 2017 sebesar Rp 14.291.939.000 dan 2018 sebesar Rp 14.622.475.000. Selanjutnya tahun 2019 APBA menjadi sebesar Rp 15.523.728.000 dan 2020 sebesar Rp 15.457.220.000. Dengan demikian APBA mengalami peningkatan sejak 2008-2020 walaupun tahun 2007 mengalami penurunan.

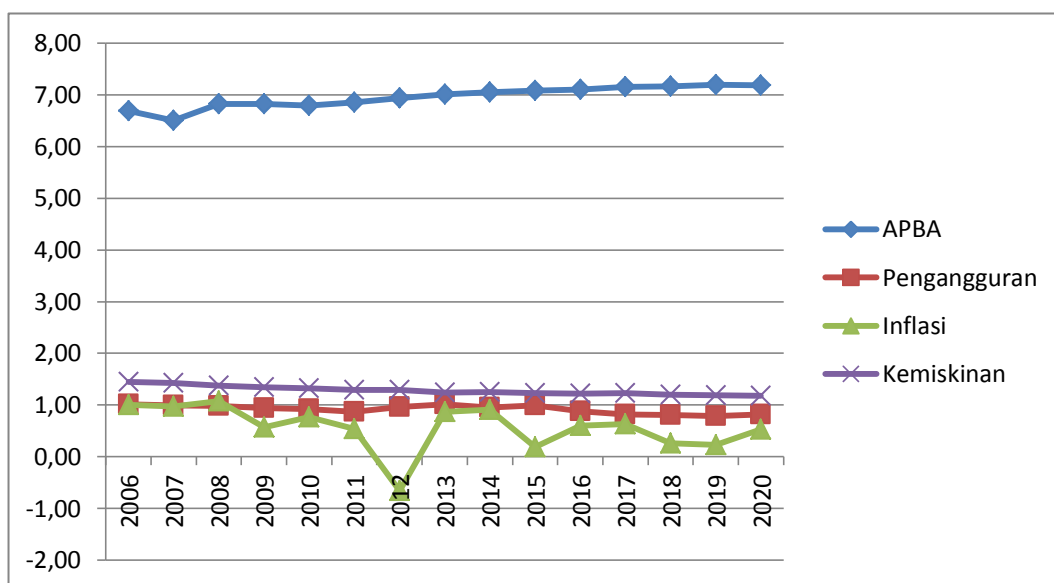
Tabel 4.2 juga dapat diketahui mengenai tingkat pengangguran di Aceh dimana tingkat pengangguran tertinggi berada di tahun 2006 dan tahun 2010 mencapai 10% sementara terendah adalah di tahun 2019 sebesar 6,17% sehingga memberikan gambaran bahwa di tahun 2020 terjadi peningkatan pengangguran di Aceh. Tingginya angka pengangguran di Aceh menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan, akibat dari tidak bekerja dan tidak adanya pendapatan sehingga tidak ada daya beli.

Tabel 4.2 juga memberikan gambaran mengenai tingkat inflasi di Aceh sejak tahun 2006-2020. Angka inflasi yang tinggi akan menyebabkan tinggi harga-harga produk dan menurunnya daya beli. Hal ini juga akan berdampak pada perusahaan yang tutup karena harga bahan baku yang tinggi dan menyebabkan tingginya pengangguran. Angka inflasi tertinggi terjadi di tahun 2008 sampai dengan 11,92% dan terendah di tahun 2012.

Tabel 4.2 menunjukkan persentase kemiskinan di Aceh terendah di tahun 2020 yaitu 14,99% dan persentase kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2006 yang besaran persentasenya mencapai 28,28%. Angka kemiskinan yang tinggi di tahun 2006 akibat dari musibah Tsunami yang terjadi di tahun 2004 yang berdampak hingga tahun 2010 dengan persentase antara 20% sampai dengan 28%.

Mengenai kondisi ini maka dapat digambarkan dengan grafik berdasarkan data yang telah dilogaritma sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Grafik APBA, Pengukuran, Inflasi dan Kemiskinan Provinsi Aceh**  
**Tahun 2006-2020**



Sumber: data sekunder penelitian, diolah, 2022

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kondisi dari empat variabel yang terdiri dari APBA ( $X_1$ ), Pengangguran ( $X_2$ ) dan Inflasi ( $X_3$ ) serta variabel terikat kemiskinan ( $Y$ ). data yang berada paling atas atau terbesar adalah APBA dan kemudian disusul data kemiskinan serta pengangguran dan inflasi. APBA berada di antara lebih dari 6% hingga lebih dari 7%. Semenara kemiskinan antara 1-2%

serta angka pengangguran ebrada di kurang dari 1%. Selanjutnya untuk inflasi di tahun 2012 mengalami minus dan yang lain berada di antara 0-1%.

### 4.1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 4.1.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan One Smaple Kolmogorov-Smirnov. Berikut tabel hasil uji metode Kolmogorov Smirnov.

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,02517380
	Absolute	,128
Most Extreme Differences	Positive	,128
	Negative	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		,496
Asymp. Sig. (2-tailed)		,966

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data sekunder penelitian, diolah, 2022

Dengan dasar apabila probabilitas (sig) > 0,05 berarti data telah terdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian SPSS 20.00 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,966 maka nilai 0,966 > 0,05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal.

#### 4.1.3.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model terdapat korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dengan menggunakan nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 LogAPBA	,513	1,950
LogPengangguran	,564	1,773
LogInflasi	,834	1,199

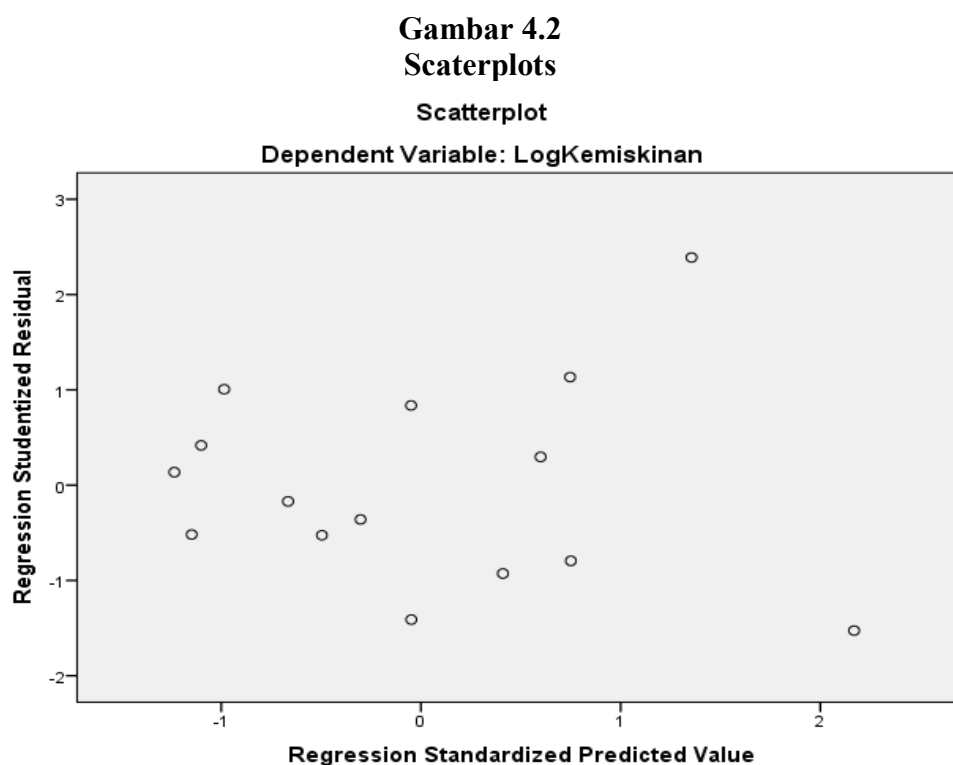
Sumber: data sekunder penelitian, diolah, 2022

Tabel 4.4 dapat diketahui hasil uji multikolinearitas, terdapat nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai *variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . APBA diperoleh tolerance  $< 0,1$  ( $0,513 < 0,1$ ), VIF  $< 10$  ( $1,950 < 10$ ). Pengangguran diperoleh tolerance  $< 0,1$  ( $0,564 < 0,1$ ), VIF  $< 10$  ( $1,773 < 10$ ). Inflasi diperoleh tolerance  $< 0,1$  ( $0,834 < 0,1$ ), VIF  $< 10$  ( $1,199 < 10$ ). Dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.1.3.3. Uji Heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (ZRESID), jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.



Sumber: data sekunder penelitian, diolah, 2022

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji heterokedastisitas diatas menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heterokedastisitas. Dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

#### 4.1.3.4. Uji Autokorelasi

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terjadi



autokorelasi atau tidak maka dilakukan identifikasi dengan menggunakan Uji Durbin Watson.

**Tabel 4.5**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,955 <sup>a</sup>	,912	,888	,02840	2,099

a. Predictors: (Constant), LogInflasi, LogPengangguran, LogAPBA

b. Dependent Variable: LogKemiskinan

Sumber: hasil olah data, 2022

Dari nilai durbin watson di atas adalah sebesar 2.0991 kemudian diketahui nilai dl dan du dari 15 data dengan 4 variabel masing-masing adalah sebesar dl (0,81396) dan du (1,75014) kemudian  $4 - dl$  (3,18604) dan  $4 - du$  (2,24986). Dengan demikian maka  $du < d < 4 - du$  ( $1,75014 < 2,0991 > 2,24986$ ), maka tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negative dalam penelitian ini.

#### 4.1.4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh negatif atau positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program statistik yaitu SPSS versi 20,0. Hasil pengujian sebagai berikut.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,670	,443		8,285	,000
1 LogAPBA	-,357	,052	-,863	-6,907	,000
LogPengangguran	,099	,125	,095	,796	,443
LogInflasi	,012	,019	,061	,620	,548

a. Dependent Variable: Logkemiskinan

Sumber: hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 maka hasil persamaan sebagai berikut:

$$\text{LogY} = 3,670 - 0,357\log X_1 + 0,099\text{Log}X_2 + 0,012\text{Log}X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,670 merupakan nilai dari kemiskinan di provinsi Aceh sebelum dipengaruhi oleh variabel APBA, pengangguran dan inflasi.
2. Koefisien regresi variabel APBA sebesar -0,357 artinya APBA berpengaruh tidak searah atau negatif terhadap kemiskinan apabila terjadi kenaikan nilai variabel APBA sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,357% dengan asumsi variabel pengangguran dan inflasi tetap atau tidak mengalami perubahan.
3. Koefisien regresi variabel penangguran sebesar 0,099 artinya pengangguran berpengaruh searah atau positif terhadap kemiskinan, apabila terjadi kenaikan nilai variabel penangguran sebesar 1% maka akan meningkatkan kemiskinan

sebesar 0,099% dengan asumsi variabel APBA dan inflasi tetap atau tidak mengalami perubahan.

4. Koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0,012 artinya inflasi berpengaruh searah atau positif terhadap kemiskinan, apabila terjadi kenaikan nilai variabel inflasi sebesar 1% maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,012% dengan asumsi variabel APBA dan pengangguran tetap atau tidak mengalami perubahan.

#### 4.1.5. Hasil Uji t

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji t (uji secara parsial). Pengujian secara parsial dilakukan dengan membandingkan t hitung di tabel 4.10 dan t tabel pada lampiran (2,20099) dan perbandingan nilai t sig dan  $\alpha$  5%. Nilai t sig dapat dilihat pada tabel 4.7

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,670	,443		8,285	,000
1 LogAPBA	-,357	,052	-,863	-6,907	,000
LogPengangguran	,099	,125	,095	,796	,443
LogInflasi	,012	,019	,061	,620	,548

a. Dependent Variable: Logkemiskinan

Sumber: hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut maka uji t sebagai berikut:

1. Uji t variabel APBA terhadap kemiskinan, diperoleh t hitung  $-6,907 > -2,20099$  dan  $t \text{ sig} < \alpha 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dapat dinyatakan secara parsial APBA memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena semakin besar nilai APBA maka banyak kegiatan untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana umum berupa jalan, pemberian bantuan usaha, pemberian fasilitas kesehatan dan pendidikan.
2. Uji t variabel pengangguran terhadap kemiskinan, diperoleh t hitung  $< t$  tabel ( $0,796 < 2,20099$ ) dan  $t \text{ sig} > \alpha 5\%$  ( $0,443 > 0,05$ )  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dapat dinyatakan secara parsial pengangguran memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena pengangguran yang besar dapat menjadi penyebab kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan.
3. Uji t variabel inflasi terhadap kemiskinan, diperoleh t hitung  $< t$  tabel ( $0,620 < 2,20099$ ) dan  $t \text{ sig} > \alpha 5\%$  ( $0,548 > 0,05$ )  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dapat dinyatakan secara parsial inflasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena inflasi yang ada di Aceh masih berada di 1 digit dan belum terlalu tinggi sehingga tidak nyata mempengaruhi kemiskinan.

#### **4.1.6. Hasil Uji F (Uji Secara Simultan)**

Uji hipotesis yang dilakukan selain menggunakan uji t atau uji secara parsial juga dilakukan uji F atau uji secara simultan atau bersama-sama yang dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung pada tabel 4.8 dan F tabel pada

lampiran. Nilai F tabel (3,59) dan nilai F sig pada tabel 4.8 dan nilai  $\alpha$  5%. Hasil pengujian dengan aplikasi statistik SPSS sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,092	3	,031	37,948	,000 <sup>b</sup>
Residual	,009	11	,001		
Total	,101	14			

a. Dependent Variable: LogKemiskinan

b. Predictors: (Constant), LogInflasi, LogPengangguran, LogAPBA

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut maka dapat diketahui nilai F hitung  $>$  F tabel ( $37,948 > 3,59$ ) dan nilai F sig  $<$   $\alpha$  5% ( $0,000 < 0,05$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan dapat dinyatakan secara simultan APBA, pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

#### 4.1.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi diketahui dari tabel *Model Summary* yaitu:

**Tabel 4.9**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,955 <sup>a</sup>	,912	,888	2,20039

a. Predictors: (Constant), LogInflasi, LogPengangguran, LogAPBA

b. Dependent Variable: LogKemiskinan

Sumber: Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,888 atau bila dipersentasekan maka 88,8% variabel bebas (APBA, pengangguran dan inflasi) dapat menjelaskan kemiskinan di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan benar-benar dapat dilihat dari pengaruh APBA, pengangguran dan inflasi.

## **4.2. Analisis**

### **4.2.1. Pengaruh APBA terhadap Kemiskinan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh berdasarkan hasil penelitian dengan nilai  $t$  hitung  $-6,907 > -2,20099$ ) dan  $t \text{ sig} < \alpha 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dapat dinyatakan secara parsial APBA memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut karena semakin besar nilai APBA maka banyak kegiatan untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana umum berupa jalan, pemberian bantuan usaha, pemberian fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemudian nilai anggaran pendapatan dan belanja Aceh yang meningkat setiap tahunnya (berdasarkan data penelitian 2006-2020) terkecuali tahun 2007.

Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan atas penggunaan pendapatan untuk belanja provinsi baik untuk program fisik sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat umum maupun belanja untuk program non fisik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penyuluhan-penyuluhan (ekonomi, pertanian, perikanan, perkebunan dan juga kehidupan sosial). Adanya pembangunan fisik dan non fisik diharapkan

dapat mengembangkan perekonomian dan menurunkan kemiskinan di Aceh. Pengaruh APBA terhadap kemiskinan sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah dalam APBD mencerminkan kebijakan pemerintahan suatu daerah. Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi, serta peningkatan pendapatan per kapita.<sup>82</sup> dan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>83</sup>

#### **4.2.2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan**

Pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $0,796 < 2,20099$ ) dan  $t$  sig  $> \alpha$  5% ( $0,443 > 0,05$ )  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dapat dinyatakan secara parsial pengangguran memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena pengangguran yang besar dapat menjadi penyebab kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan. Hasil tersebut juga dikarenakan pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan. Bila tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan maka tidak memungkinkan untuk memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebut menjadi indikator untuk masyarakat

---

<sup>82</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2004) hal 20

<sup>83</sup> Debby Ch, Rotinsulu, Avriano R, Luciana, Analisis Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara, (Jurnal Ekonomi, Vol 4 No 2, 2018)

yang menganggur menjadi miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengangguran mempengaruhi kemiskinan sesuai dengan pernyataan Subandi bahwa yang menyebabkan kemiskinan diantaranya adalah, pengangguran penduduk.<sup>84</sup> Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dimana pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.<sup>85</sup>

#### 4.2.3. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $0,620 < 2,20099$ ) dan  $t$  sig  $> \alpha$  5% ( $0,548 > 0,05$ )  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dapat dinyatakan secara parsial inflasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena inflasi yang ada di Aceh masih berada di 1 digit dan belum terlalu tinggi sehingga tidak nyata mempengaruhi kemiskinan. Inflasi juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi sehingga inflasi tetap dibutuhkan pemerintah untuk mengukur perekonomian. Inflasi yang terjadi di Aceh berdasarkan data penelitian tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 tidak tetap melainkan berubah-ubah setiap tahunnya. Inflasi tertinggi berdasarkan penelitian mencai 11% dan hal tersebut hanya terjadi 1 tahun yaitu tahun 2008 dimana tahun tersebut terjadi krisis global dan berdampak pada berbagai negara dan termasuk Aceh yang merupakan bagian dari negara Indonesia. Inflasi secara umum di Aceh masih dalam kondisi 1 digit dan tidak terlalu berdampak pada kemiskinan. Inflasi dapat mempengaruhi kemiskinan dimana terdapat pernyataan Subandi bahwa Faktor penyebab kemiskinan

---

<sup>84</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hal 92

<sup>85</sup> Rukmanasari, Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)



diantaranya adalah inflasi penduduk.<sup>86</sup> Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, dimana inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.<sup>87</sup>

#### 4.2.4. Pengaruh APBA, Pengangguran dan Inflasi terhadap Kemiskinan

APBA, Pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh yang diketahui dari hasil nilai F hitung  $> F$  tabel ( $37,948 > 3,59$ ) dan nilai F sig  $< \alpha$  5% ( $0,000 < 0,05$ ) secara simultan APBA, pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

Pengaruh signifikan tersebut dikarenakan APBA yang terus meningkat dan digunakan untuk pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian pengangguran yang ada turut mempengaruhi kemiskinan, dimana terdapat kemiskinan tetapi persentasenya tidak terlalu besar berdasarkan data penelitian. Sementara inflasi yang terjadi juga tidak tetap atau berubah-ubah setiap tahunnya sehingga mempengaruhi kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dimana inflasi dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>88</sup> demikian pada penelitian lain dimana kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara bahwa APBD signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hal 92

<sup>87</sup> Imelia, Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, (*Jurnal Paradigma Ekonomika*, 2012)

<sup>88</sup> Intan Permata Sari Br Sembiring, Surtama Simanjuntak dan Vini Alvionita Br Sitepu, Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara tahun 2006-2020, (*Jurnal Ilmu Sosiosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol 2, No 2, 2021)

<sup>89</sup> Debby Ch, Rotinsulu, Avriano R, Luciana, Analisis Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara, (*Jurnal Ekonomi*, Vol 4 No 2, 2018)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh atas penelitian ini, dapat ditarik kesimpulannya:

1. Hasil penelitian diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t,  $t$  hitung  $-6,907 > -2,20099$ ) dan  $t$  sig  $< \alpha$  5% ( $0,000 < 0,05$ ).
2. Hasil penelitian juga diketahui untuk pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t dengan perolehan nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $0,796 < 2,20099$ ) dan  $t$  sig  $> \alpha$  5% ( $0,443 > 0,05$ ).
3. Hasil penelitian diketahui untuk inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t,  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $0,620 < 2,20099$ ) dan  $t$  sig  $> \alpha$  5% ( $0,548 > 0,05$ ).
4. Hasil penelitian diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji F dengan nilai F hitung  $> F$  tabel ( $37,948 > 3,59$ ) dan nilai F sig  $< \alpha$  5% ( $0,000 < 0,05$ ).

## **5.2. Saran**

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Melalui hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kemiskinan di Provinsi Aceh yang dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Pengangguran dan inflasi.
2. Bagi pemerintah Aceh dengan informasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan mengenai kemiskinan di Provinsi Aceh berkaitan dengan APBA, tingkat pengangguran dan juga inflasi
3. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjut yang ingin meneliti kemiskinan di Provinsi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhammad, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Burhan, Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011
- Ghozali Imam, *Analisis Multivariat*, Semarang, BP Undip, 2013
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- <https://www.pahamindonesia.org/gaji-di-bawah-upah-minimum-karena-bergantung-pendapatan-perusahaan/> diunduh 25 Oktober 2021
- Ihsan Khairil dan Ikhsan, Analisis Pengaruh UMP, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3 No 3, 2018
- Imelia, Pengaruh inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi, (*Jurnal Paradigma Ekonomi*, Vol 1, No 5, 2012
- Indriantoro Nur dan Supomo, Bambang, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: BPFE, 2014
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Kartasaputra G, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Kuncoro Mudarajad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, UPP YKPN, 2010
- Kurniawan, Acep. Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018
- Machmud, Amir, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Erlangga, 2016
- Mankiw Gregori N, *Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2016
- Marisa dan Haryadi, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2016
- Masyhuri Machfudz, M. Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Moekijat, *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta: BPFE YKPN, 2011
- Pabundu, Tika Moh, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016
- Peraturan Pemerintah, *PP No 78 tahun 2015 tentang upah minimum provinsi*

- Purwanto, *Statistik untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Rahardja Prathama dan Manurung Mandala, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPP FE UI, 2012
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap, 2015
- Retnowati Diah dan Harsuti, Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3, No 2, 2017
- Rosandi, Indra Riko, *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 3*, 2017
- Rukmanasari, Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo, *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2021
- Santoso, Tri Wibowo Budi & Susilo Hadi, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Saputra, Whisnu Adhi, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2011.
- Sarwono, Jhonatan, *Statistik Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2012
- Sembiring, Intan Permata Sari Br, Simanjuntak Surtama dan Sitepu, Vini Alvionita Br, Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara tahun 2006-2020, *Jurnal Ilmu Sosioial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol 2, No 2, 2021
- Sirusa BPS, <http://sirusa.bps.go.id/indeks.php?indikator=wiew&id=44>, 2021
- Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia, Pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Indonesia *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol 5. No.2, 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi, ArikuntO, *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2016
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Sukidin dan Mundir, *Metodologi Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan*, Surabaya: Insan Cendekia, 2015
- Sukirno Sadono, *Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Suliswanto, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Andi, 2014

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang  
Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah

Telasari Melistika Indriana, Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia,  
*Skripsi*: Universitas Islam Indonesia, 2017

Lampiran 1 APBA, Pengangguran, Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh  
Tahun 2006-2020

No	Tahun	APBA	Pengangguran	Inflasi	Kemiskinan
1	2006	4.929.000	10,43	9,98	28,28
2	2007	3.165.343	9,84	9,41	26,65
3	2008	6.644.765	9,56	11,92	23,53
4	2009	6.732.212	8,71	3,72	21,8
5	2010	6.244.669	8,37	5,86	20,98
6	2011	7.089.390	7,43	3,43	19,57
7	2012	8.714.808	9,1	0,22	19,46
8	2013	10.111.367	10,3	7,31	17,6
9	2014	11.164.409	9,02	8,09	17,72
10	2015	12.010.743	9,93	1,53	16,98
11	2016	12.551.166	7,57	3,95	16,73
12	2017	14.291.939	6,57	4,25	16,89
13	2018	14.622.475	6,34	1,84	15,97
14	2019	15.523.728	6,17	1,69	15,32
15	2020	15.457.220	6,59	3,39	14,99

Data di Log untuk regresi linier berganda

APBA, Pengangguran, Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2006-2015

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>APBA</b>	<b>Pengangguran</b>	<b>Inflasi</b>	<b>Kemiskinan</b>
1	2006	6,692758805	1,018284308	0,9991305	1,451479405
2	2007	6,500420778	0,992995098	0,9735896	1,425697213
3	2008	6,822479626	0,980457892	1,0762763	1,371621927
4	2009	6,828157784	0,940018155	0,5705429	1,338456494
5	2010	6,795509433	0,922725458	0,7678976	1,321805484
6	2011	6,850608849	0,870988814	0,5352941	1,291590826
7	2012	6,94025784	0,959041392	-0,657577	1,289142836
8	2013	7,004809894	1,012837225	0,8639174	1,245512668
9	2014	7,047835724	0,955206538	0,9079485	1,248463718
10	2015	7,079569866	0,996949248	0,1846914	1,229937686
11	2016	7,098684074	0,87909588	0,5965971	1,223495941
12	2017	7,155091154	0,81756537	0,6283889	1,22762965
13	2018	7,165020888	0,802089258	0,2648178	1,203304916
14	2019	7,190996025	0,790285164	0,2278867	1,185258765
15	2020	7,189131388	0,818885415	0,5301997	1,175801633



## Lampiran 2 Output Statistik dengan Aplikasi SPSS versi 20,0

**Descriptives****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LogAPBA	15	6,50	7,19	6,9574	,20484
LogPengangguran	15	,79	1,02	,9172	,08096
LogInflasi	15	-,66	1,08	,5646	,44039
LogKemiskinan	15	1,18	1,45	1,2819	,08481
Valid N (listwise)	15				

**Regression****Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LogInflasi, LogPengangguran, LogAPBA <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: LogKemiskinan

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,955 <sup>a</sup>	,912	,888	,02840	2,099

a. Predictors: (Constant), LogInflasi, LogPengangguran, LogAPBA

b. Dependent Variable: LogKemiskinan

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,092	3	,031	37,948	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,009	11	,001		
	Total	,101	14			

a. Dependent Variable: LogKemiskinan

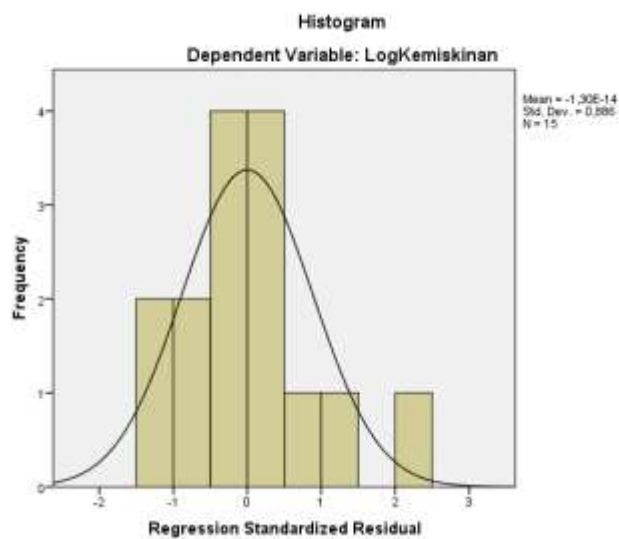
b. Predictors: (Constant), LogInflasi, LogPengangguran, LogAPBA

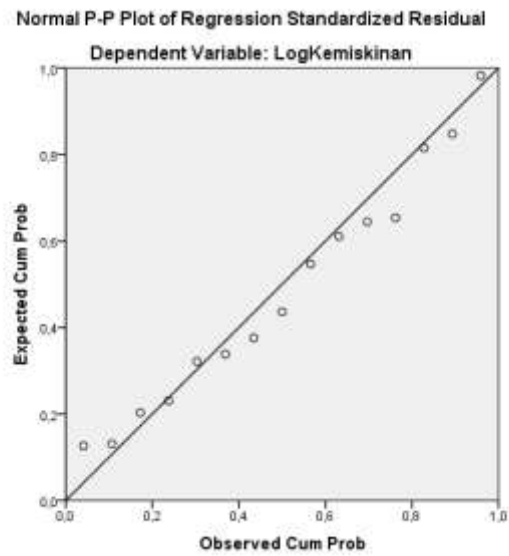
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,670	,443		8,285	,000	
	LogAPBA	-,357	,052	-,863	-6,907	,000	,513
	LogPengangguran	,099	,125	,095	,796	,443	,564
	LogInflasi	,012	,019	,061	,620	,548	,834

a. Dependent Variable: LogKemiskinan

## Charts





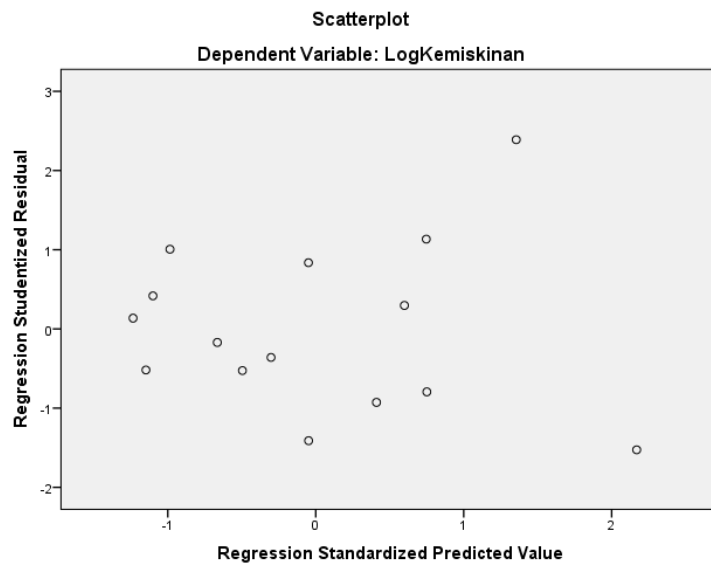
## NPar Tests

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,02517380
	Absolute	,128
Most Extreme Differences	Positive	,128
	Negative	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		,496
Asymp. Sig. (2-tailed)		,966

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 3 Tabel t

Lampiran 4 Tabel F

## Lampiran 5 Tabel Durbin Watson

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 503 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 03 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Muhammad Dayyan, M.Ec sebagai Pembimbing I dan Ade Fadillah FW Pospos, MA sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama Aida Shafira, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022017102, dengan Judul Skripsi : "Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh".
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
Pada Tanggal 27 Desember 2021 M  
27 Jumadil Awwal 1443 H H

Dekan  
  
Iskandar



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;  
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

**SURAT KETERANGAN**


**Nomor: B/645/In.24/LAB/PP.00.9.07/2022**

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Aida Shafira  
NIM : 4022017102  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH, PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 18 Juli 2022 Af  
Kepala Laboratorium FEBI

  
Mastura, M.E.I  
NIDN. 2013078701

## DAFTAR RIWAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Aida Shafira
2. NIM : 4022017102
3. Tempat/TTL : Langsa, 14 Februari 2000
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Lilawangsa Dusun I Keude Rambe,  
Gp. Geudubang Aceh, Kec. Langsa Baro

### II. ORANG TUA

1. Ayah : Alm. Syarifuddin
2. Ibu : Ernawaty

### III. RIWAT PENDIDIKAN

1. Tamatan Min Paya Bujuk Langsa
2. Tamatan SMP Negeri 1 Langsa
3. Tamatan SMA Negeri 1 Langsa

Langsa, 21 Februari 2023

Aida Shafira